PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	:	Ir. AGUS YUWONO, M.Si.
Jabatan	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

N a m a	:	Hj. NURHIDAYAH, S.H, M.H
Jabatan	:	BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan bun, Januari 2018

Pihak Kedua.	**Pihak Pertama.**
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Hj. NURHIDAYAH, S.H, M.H	**Ir. AGUS YUWONO, M.Si** Pembina Utama Muda NIP. 19590814 198812 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan di kabupaten	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	78,34	%
2	Meningkatnya konektivitas wilayah di kabupaten	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi	83,10	%
3	Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	79	%
		Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	90	%
		Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (> 30 cm selama 2 jam, > 2 kali setahun)	77	%
4	Berkurangnya permukiman kumuh diperkotaan	Persentase berkurangnya luasan pemukiman kumuh di perkotaan	76,90	%
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan irigasi	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi sesuai dengan kewenangan	33	%
6	Tersedianya sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	19	%
7	Meningkatnya kapasitas pengendali daya rusak air dan upaya pengamanan pantai	Persentase berkurangnya kawasan rawan banjir	16	%
		Persentase berkurangnya kawasan erosi dan abrasi pantai	45	%
8	Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana rinci tata ruang kabupaten/kota	16,67	%

NO.	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	3.337.269.546,00	APBD
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp	580.512.000,00	APBD
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp	210.126.500,00	APBD
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp	228.000.000,00	APBD
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp	4.380.000,00	APBD
6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp	130.392.952.750,00	APBD/APBN
7	Program Pembangunan dan Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong	Rp	8.595.354.119,00	APBD
8	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp	7.250.045.000,00	APBD
9	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Rp	196.260.000,00	APBD
10	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Rp	1.365.500.000,00	APBD
11	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rp	14.953.280.600,00	APBD/APBN
12	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Rp	4.669.724.200,00	APBD
13	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Rp	12.467.438.481,00	APBD/APBN
14	Program pengendalian banjir	Rp	11.078.980.600,00	APBD
15	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Rp	11.551.427.000,00	APBD
16	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Rp	29.960.191.704,00	APBD
17	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Rp	803.242.000,00	APBD
18	Program Pembinaan Konstruksi	Rp	1.028.165.500,00	APBD
	JUMLAH	Rp	238.672.850.000,00	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Hj. NURHIDAYAH, S.H, M.H

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Ir. AGUS YUWONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590814 198812 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Sutan Syahrir No. 05 Telp.(0532) 21034 Fax. (0532) 22011
PANGKALAN BUN 74112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 600/05.A /PUPR

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAANUMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan KerjaPerangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
Kesatu	:	Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;
Kedua	:	Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat setiap tahun untuk menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 – 2022;
Ketiga	:	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada Tanggal Januari 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Ir. AGUS YUWONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590814 198812 1 001

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Nomor : 600/ 05.A /PUPR
Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN/FORMULA HITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan di kabupaten	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	$\frac{\sum^{akhir\ tahun\ pencapaian\ SPM} \text{Panjang Jalan Memenuhi Kondisi Jalan Baik dan Sedang}}{\sum^{eksisting} \text{Panjang Jalan Kabupaten}} x100\%$	78,34%	Kabid. Bina Marga
2.	Meningkatnya konektivitas wilayah di kabupaten	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi	$\frac{\sum^{akhir\ tahun\ pencapaian\ SPM} \text{Panjang Jalan Penghubung Pusat} - \text{Pusat Kegiatan dan Pusat} - \text{Pusat Prod}}{\sum^{target\ keseluruhan} \text{Panjang Jalan Penghubung Pusat} - \text{Pusat Kegiatan dan Pusat} - \text{Pusat Produks}}$	83,10%	Kabid. Bina Marga
3.	Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	$\frac{\sum^{akhir\ tahun\ pencapaian\ SPM} \text{Masyarakat terlayani air minum}}{\sum^{akhir\ tahun\ pencapaian\ SPM} \text{Proyeksi total Masyarakat}} x100\%$	79%	Kabid. Cipta Karya
		Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	$\frac{\sum \text{Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/MCK Komunal/SPAL Terpusat}}{\sum^{akhir\ tahun\ pencapaian\ SPM} \text{Jumlah total penduduk kabupaten}} x100\%$	90%	Kabid. Cipta Karya
		Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (> 30 cm selama 2 jam, > 2 kali setahun)	$\frac{\sum \text{Jumlah Penduduk yang rumahnya terlayani sistem drainase}}{\sum \text{Jumlah penduduk seluruh kota}} x100\%$	77%	Kabid. Cipta Karya
4.	Berkurangnya permukiman kumuh diperkotaan	Persentase berkurangnya luasan pemukiman kumuh di perkotaan	$\frac{\sum^{akhir\ tahun\ pencapaian\ SPM} \text{Permukiman Kumuh yang Tertangani di Kota A}}{\sum^{KotaA} \text{Total Permukiman Kumuh yang Telah Ditetapkan di Kota A}} x100\%$	76,90%	Kabid. Cipta Karya
5.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan irigasi	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi sesuai dengan kewenangan	$\frac{\sum \text{Ketersediaan Air Irigasi } \left(\frac{\text{liter}}{\text{detik}}\right) \text{pada Setiap Musim Tanam}}{\sum \text{Kebutuhan Air Irigasi } \left(\frac{\text{liter}}{\text{detik}}\right) \text{berdasarkan Rencana Tata Tanam}} x100\%$	33%	Kabid. Sumber Daya Air

1	2	3	4	5	6
6.	Tersedianya sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	$\frac{\sum \text{Ketersediaan Air Baku } \left(m^3/_{\text{tahun}}\right) \text{ dari Instalasi Pengolah Air}}{\sum \text{Kebutuhan Air Baku } \left(m^3/_{\text{tahun}}\right) \text{ berdasarkan Target MDGs}} x100\%$	19%	Kabid. Sumber Daya Air
7.	Meningkatnya kapasitas pengendali daya rusak air dan upaya pengamanan pantai	Persentase berkurangnya kawasan rawan banjir	$\frac{\text{Target Penanganan Banjir}}{\text{Total Daerah Banjir}} x100\%$	16%	Kabid. Sumber Daya Air
		Persentase berkurangnya kawasan erosi dan abrasi pantai	$\frac{\text{Panjang Pantai yang Sudah Tertangani di Daerah Kritis}}{\text{Panjang Pantai Kritis}} x100\%$	45%	Kabid. Sumber Daya Air
8.	Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana rinci tata ruang kabupaten/kota	$\frac{\sum^{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Jumlah Peta Analog/Digital}}{\sum^{\text{Seluruhkab/Kota/Kec/Kelurahan}} \text{Jumlah Peta Analog/Digital}} \text{x}100\%$	16,67%	Kabid. Penataan Ruang
	8 Sasaran	**11 IKU**			

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada Tanggal Januari 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Ir. AGUS YUWONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590814 198812 1 001

PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	PENJELASAN/FORMULA HITUNGAN	DATA PERHITUNGAN	HASIL
	2	3	4	5	6
1	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	78,34%	$\frac{\sum^{akhir\ tahun\ pencapaian\ SPM} \text{Panjang Jalan Memenuhi Kondisi Jalan Baik dan Sedang}}{\sum^{eksisting} \text{Panjang Jalan Kabupaten}} x100\%$	$\frac{609{,}21 + 350{,}967}{1222{,}845} x100\%$	78,52%
2	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi	83,10%	$\frac{\sum^{akhir\ tahun\ pencapaian\ SPM} \text{Panjang Jalan Penghubung Pusat} - \text{Pusat Kegiatan dan Pusat} - \text{Pusat Produksi}}{\sum^{target\ keseluruhan} \text{Panjang Jalan Penghubung Pusat} - \text{Pusat Kegiatan dan Pusat} - \text{Pusat Produksi}} x100\%$	$\frac{1222{,}845}{1222{,}845} x100\%$	100%
3	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	79%	$\frac{\sum^{akhir\ tahun\ pencapaian\ SPM} \text{Masyarakat terlayani air minum}}{\sum^{akhir\ tahun\ pencapaian\ SPM} \text{Proyeksi total Masyarakat}} x100\%$	$\frac{187.007}{277.048} x100\%$	67,5%
4	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	90%	$\frac{\sum \text{Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/MCK Komunal/SPAL Terpusat}}{\sum^{akhir\ tahun\ pencapaian\ SPM} \text{Jumlah total penduduk kabupaten}} x100\%$	$\frac{242.749}{277.048} x100\%$	87,6%
5	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (> 30 cm selama 2 jam, > 2 kali setahun)	77%	$\frac{\sum \text{Jumlah Penduduk yang rumahnya terlayani sistem drainase}}{\sum \text{Jumlah penduduk seluruh kota}} x100\%$	$\frac{138.349}{165.688} x100\%$	83,5%

6	Persentase berkurangnya luasan pemukiman kumuh di perkotaan	76,90%	$\frac{\sum^{akhir\ tahun\ pencapaian\ SPM} \text{Permukiman Kumuh yang Tertangani di Kota A}}{\sum^{KotaA} \text{Total Permukiman Kumuh yang Telah Ditetapkan di Kota A}} x100\%$	$\frac{8{,}20}{260{,}00} x100\%$	61,8%
7	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian dan sistem irigasi sesuai dengan kewenangan	33%	$\frac{\sum \text{Ketersediaan Air Irigasi } \left(\frac{\text{liter}}{\text{detik}}\right) \text{pada Setiap Musim Tanam}}{\sum \text{Kebutuhan Air Irigasi } \left(\frac{\text{liter}}{\text{detik}}\right) \text{berdasarkan Rencana Tata Tanam}} x100\%$	$\frac{100{,}80(\frac{\text{Lt}}{\text{dt}})}{132{,}00(\frac{\text{Lt}}{\text{dt}})} x100\%$	76%
8	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	19%	$\frac{\sum \text{Ketersediaan Air Baku } \left(m^3/_{\text{tahun}}\right) \text{dari Instalasi Pengolah Air}}{\sum \text{Kebutuhan Air Baku } \left(m^3/_{\text{tahun}}\right) \text{berdasarkan Target MDGs}} x100\%$	$\frac{6.694.122 + 400.464\ m3/Thn}{10.632.564\ m3/Thn} x100\%$	68,73%
9	Persentase berkurangnya kawasan rawan banjir	16%	$\frac{\text{Target Penanganan Banjir}}{\text{Total Daerah Banjir}} x100\%$	$\frac{13}{30} x100\%$	43,33%
10	Persentase berkurangnya kawasan erosi dan abrasi pantai	45%	$\frac{\text{Panjang Pantai yang Sudah Tertangani di Daerah Kritis}}{\text{Panjang Pantai Kritis}} x100\%$	$\frac{155.520}{33.300} x100\%$	46,60%
11	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana rinci tata ruang kabupaten/kota	16,67%	$\frac{\sum^{akhir\ tahun\ pencapaian\ SPM} \text{Jumlah Peta Analog/Digital}}{\sum^{Seluruhkab/Kota/Kec/Kelurahan} \text{Jumlah Peta Analog/Digital}} x100\%$	$\frac{1}{6} x100\%$	16,67%
	11 IKU				